

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengawasan Pemerintah Kota Depok pasca revitalisasi trotoar di Jalan Margonda Raya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan belum sepenuhnya mampu memastikan trotoar berfungsi konsisten sebagai ruang sirkulasi pejalan kaki. Temuan lapangan menunjukkan masih berlangsungnya penyalahgunaan fungsi trotoar, antara lain di gunakan sebagai tempat menunggu dan parkir ojek online, tempat berjualan pedagang kaki lima, serta area parkir kendaraan di beberapa titik, sehingga menghambat akses pejalan kaki dan menurunkan rasa aman serta nyaman.

Jika dianalisis menggunakan teori pengawasan George R. Terry (dalam Syahputra & Aslam, 2023) yang menekankan empat tahapan penetapan standar kinerja, pengukuran pelaksanaan kinerja, membandingkan hasil dengan standar, dan tindakan korektif, maka kesimpulan dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Penetapan standar kinerja (standar pengawasan)

Secara normatif, standar fungsi trotoar sudah jelas sebagai ruang pejalan kaki dan telah memiliki dasar regulasi. Namun, pada level implementasi, standar operasional pengawasan misalnya indikator “bebas hambatan”, titik prioritas, jam pengawasan, dan pembagian tugas lintas instansi masih perlu dipertegas agar dapat menjadi ukuran kinerja yang terukur dan seragam di lapangan.

2. Pengukuran pelaksanaan kinerja (monitoring/pemantauan)

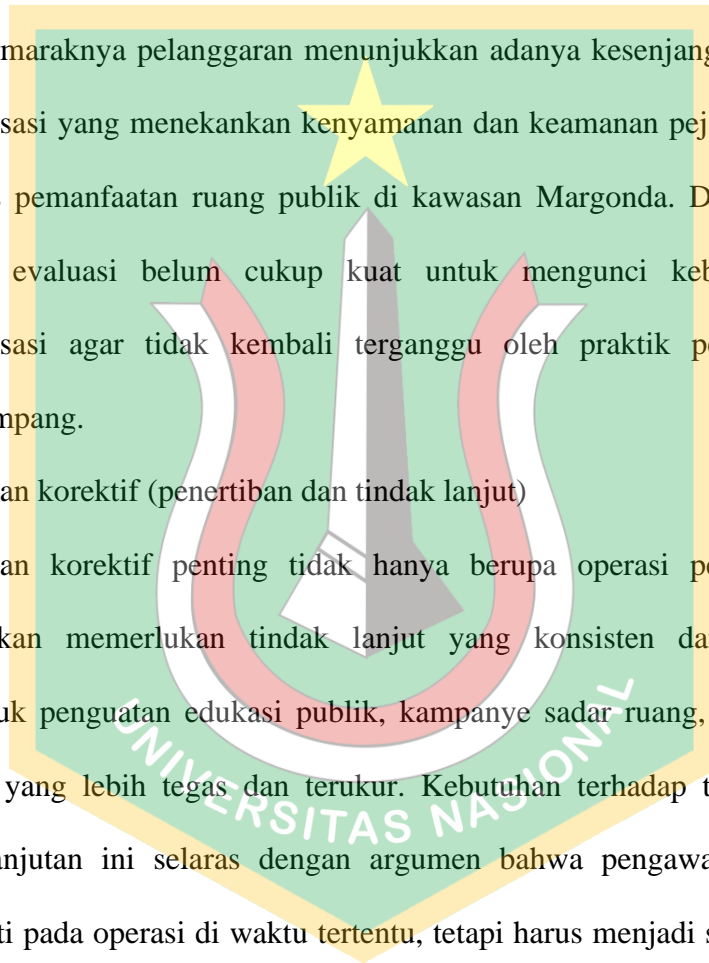
Pengawasan yang terjadi cenderung belum berlangsung secara kontinu dan sistematis. Kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa penyalahgunaan fungsi trotoar dapat muncul kembali, yang mengindikasikan adanya celah pada mekanisme pemantauan rutin dan pengendalian harian.

3. Perbandingan hasil dengan standar (evaluasi kesenjangan)

Masih maraknya pelanggaran menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan revitalisasi yang menekankan kenyamanan dan keamanan pejalan kaki dengan realitas pemanfaatan ruang publik di kawasan Margonda. Dengan demikian, fungsi evaluasi belum cukup kuat untuk mengunci keberlanjutan hasil revitalisasi agar tidak kembali terganggu oleh praktik penggunaan yang menyimpang.

4. Tindakan korektif (penertiban dan tindak lanjut)

Tindakan korektif penting tidak hanya berupa operasi penertiban sesaat, melainkan memerlukan tindak lanjut yang konsisten dan berkelanjutan, termasuk penguatan edukasi publik, kampanye sadar ruang, serta penegakan aturan yang lebih tegas dan terukur. Kebutuhan terhadap tindakan korektif berkelanjutan ini selaras dengan argumen bahwa pengawasan tidak boleh berhenti pada operasi di waktu tertentu, tetapi harus menjadi sistem yang terus berjalan.



Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah “bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah pasca revitalisasi” dapat ditegaskan bahwa pengawasan sudah ada dan melibatkan instansi teknis, namun pelaksanaannya masih perlu diperkuat agar tujuan revitalisasi tidak berhenti pada keberhasilan fisik semata, melainkan terjaga dalam praktik pemanfaatan ruang publik sehari-hari.

5.2 Implikasi Penelitian

5.2.1 Implikasi Teoritis

Penelitian ini memperkuat relevansi teori pengawasan George R. Terry sebagai kerangka analitis untuk menilai efektivitas pengawasan kebijakan publik di ranah infrastruktur perkotaan. Empat tahapan pengawasan (standar, pengukuran, perbandingan, koreksi) membantu menunjukkan bahwa kendala pengawasan sering tidak hanya terjadi pada tahap “penindakan”, tetapi juga pada tahap awal berupa penetapan standar kinerja operasional dan mekanisme pengukuran pelaksanaan yang konsisten.

5.2.2 Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan revitalisasi trotoar tidak dapat dinilai hanya dari aspek pembangunan fisik. Keberlanjutan fungsi trotoar sangat ditentukan oleh pengawasan yang berkesinambungan dan perubahan perilaku pengguna ruang publik. Oleh karena itu, pengawasan perlu dirancang sebagai rutinitas tata kelola, bukan respons insidental.

5.2.3 Implikasi Kebijakan

Secara kebijakan, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan Pemerintah Kota Depok untuk memperkuat kebijakan pengawasan pasca revitalisasi trotoar agar lebih responsif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Temuan empiris mengenai kondisi lapangan juga dapat dipakai sebagai dasar

penyusunan kebijakan serupa di wilayah perkotaan lain yang menghadapi persoalan penyalahgunaan fungsi trotoar.

5.2.4 Implikasi Akademis

Secara akademis, penelitian ini berkontribusi memperkaya kajian administrasi publik terkait pengawasan kebijakan infrastruktur dan penataan ruang kota. Selain menjadi referensi bagi penelitian berikutnya, studi ini juga menegaskan keterkaitan antara kebijakan, pelaksanaan, dan perilaku masyarakat dalam menentukan efektivitas program pembangunan perkotaan.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian mengenai pengawasan Pemerintah Kota Depok pasca revitalisasi trotoar di Jalan Margonda Raya, rekomendasi utama yang dapat diajukan adalah perlunya penguatan pengawasan yang bersifat lebih operasional, konsisten, dan berkelanjutan. Pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan penertiban pada waktu-waktu tertentu, karena pola pelanggaran di ruang publik cenderung muncul kembali ketika kontrol melemah. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Depok perlu membangun mekanisme pengawasan yang rutin dengan pembagian peran yang jelas antar-instansi terkait, sehingga tidak terjadi kekosongan pengawasan pada titik dan waktu yang rawan pelanggaran.

Selain itu, pengawasan perlu ditopang oleh standar kinerja yang terukur agar pelaksanaan di lapangan memiliki acuan yang seragam. Standar ini dapat dirumuskan dalam bentuk indikator sederhana namun konkret, seperti kondisi trotoar yang “bebas hambatan”, peta titik prioritas pengawasan, jadwal pengawasan minimal, serta target penurunan pelanggaran dalam periode tertentu. Dengan adanya standar yang jelas, proses evaluasi menjadi lebih mudah dilakukan karena

terdapat ukuran pembanding yang tegas antara tujuan revitalisasi dan realitas pelaksanaan di lapangan.

Rekomendasi berikutnya berkaitan dengan tindakan korektif. Penertiban tetap diperlukan, namun akan lebih efektif apabila disertai tindak lanjut yang konsisten, seperti edukasi publik, kampanye kesadaran penggunaan ruang pedestrian, serta penerapan sanksi yang tegas dan tidak berubah-ubah. Pendekatan ini penting untuk membangun efek jera sekaligus mendorong perubahan perilaku pengguna ruang publik, sehingga revitalisasi tidak hanya berhenti pada pembenahan fisik, tetapi juga menghasilkan ketertiban pemanfaatan ruang yang lebih berkelanjutan.

Terakhir, Pemerintah Kota Depok disarankan untuk memperkuat kolaborasi dengan masyarakat dalam pengawasan ruang publik. Pelibatan warga dapat dilakukan melalui mekanisme pelaporan yang mudah diakses, forum komunikasi, maupun pendekatan partisipatif lain yang mendorong kontrol sosial. Dengan demikian, pengawasan tidak sepenuhnya bertumpu pada aparat, melainkan menjadi upaya bersama untuk menjaga trotoar tetap aman, nyaman, dan berfungsi sesuai peruntukannya sebagai fasilitas pejalan kaki pasca revitalisasi.

